

Kedudukan Ahli Waris Golongan II Terhadap Hak Mewaris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Juhairia Ismi

Abstrak

Ketika seorang meninggal dunia kemudian timbulah permasalahan. Salah satu akibat dari meninggalnya seorang manusia di dunia ini adalah masalah status harta benda yang ditinggalkannya. Bila status ini dihubungkan dengan seorang manusia lain yang masih hidup, maka timbulah apa yang dinamakan masalah warisan. Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris dibedakan menjadi 3 bagian yaitu hukum waris bw, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Hukum waris membagi beberapa golongan-golongan yang berhak menerima waris. Salah satunya kedudukan ahli waris golongan II. Ahli waris golongan II meliputi orang tua dan saudara kandung pewaris.

Dalam skripsi ini yang menjadi titik permasalahan adalah bagaimana kedudukan dan cara pembagian untuk ahli waris golongan II terhadap hak mewaris ditinjau dari perspektif hukum perdata dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, sifatnya deskriptif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan.

Kedudukan ahli waris golongan II diatur oleh KUHPerdata Pasal 853, Pasal 854, Pasal 855 dan Pasal 856. Bagi orang beragama islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 177, Pasal 180, Pasal 181 dan Pasal 182. Pembagian harta warisan telah ditentukan oleh Undang-Undang berdasarkan berapa banyaknya keluarga yang ditinggalkan.

Kata Kunci :Hukum Waris, Ahli Waris, Kedudukan Golongan II

Position Heirs Group II of the Rights heir Seen from the Perspective of the Civil Code and Presidential Decree No. 1 of 1991 About the Compilation of Islamic Law

Juhairia Ismi

Abstract

When a problem arises later died. One result of the death of a human being in this world is the problem of the status of possessions left behind. If the status is associated with another human being who is still alive, there arises what is called inheritance. Inheritance law is a set of rules, which governs the conduct of the wealth for the death of a person that is the transfer of wealth left by the deceased and consequences of this displacement for the people who get it, either in the relationship between them with them, as well as their relationships with third parties. the law of inheritance is divided into 3 parts: bw inheritance law, Islamic inheritance law, and customary inheritance law. Inheritance law divides some factions are entitled to receive the inheritance. One of them is the position of heir class II. Heirs of class II includes the parents and siblings of the testator.

In this Undergraduate Thesis that is the problem is how to position and how the division of class II heir to inherit the rights to be reviewed from the perspective of civil law and a presidential instruction No. 1 of 1991 on the compilation of Islamic law. This type of research is normative, descriptive nature and the approach is the approach of legislation. The data in this study was obtained through secondary data. Data collection techniques in this study conducted by the research literature.

Position heir of class II is regulated by the Civil Code Article 853, Article 854, Article 855 and Article 856. For the Islamic religion stipulated in Article 177 of the Compilation of Islamic Law, Article 178, Article 181 and Article 182. The division of the estate has been determined by the Act based on how many families left behind.

Keywords: The Law of Inheritance, The Heirs, The Position of Class II